



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



SUMEDANG
The City of Knowledge



RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025

Disampaikan Oleh:

Hj. TUTI RUSWATI, S.Sos., M.Si.

Pj Sekda Sumedang



DASAR HUKUM



- **UU No, 25 Tahun 2004** Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- **UU No, 23 Tahun 2014** Tentang Pemerintahan Daerah;
- **Permendagri 86 Tahun 2017** Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- **Permendagri No, 90 Tahun 2019** Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- **Kepmendagri No, 900.1.15.5-1317 Tahun 2023** tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- **Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023** tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026

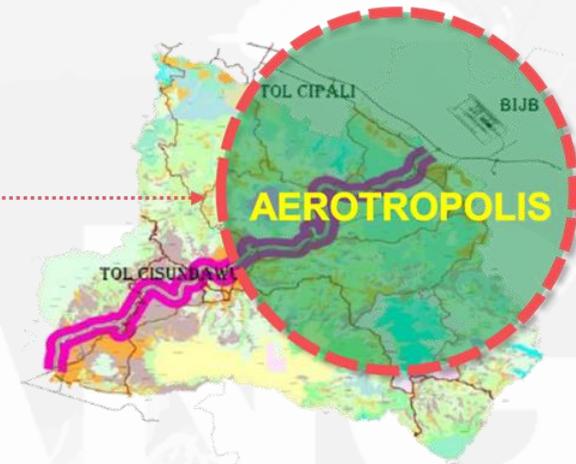
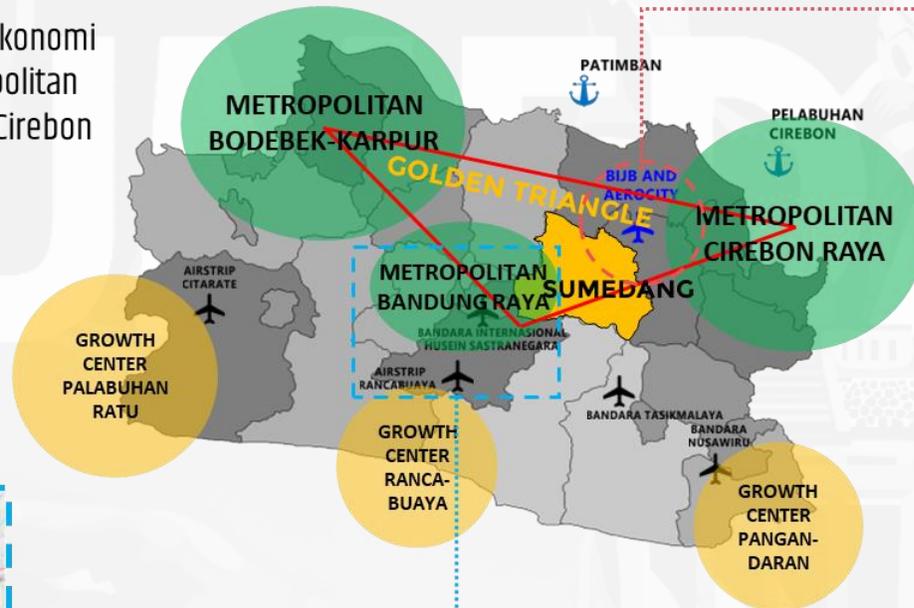


KONDISI GEOGRAFI & DEMOGRAFI

📍 $06^{\circ}34'46,18'' - 7^{\circ}00'56,25''$ LS dan $107^{\circ}01'45,63'' - 108^{\circ}21'59,04''$ BT

GEO-ECONOMY

Sumedang terletak di Koridor Ekonomi Jawa di antara tiga kota Metropolitan Jakarta Raya, Bandung Raya & Cirebon Raya.



📖 Luas Wilayah
155,872 Ha

👥 Jumlah penduduk 2022
1.176.018 JIwa

🏢 **26** Kecamatan
270 Desa
7 Kelurahan

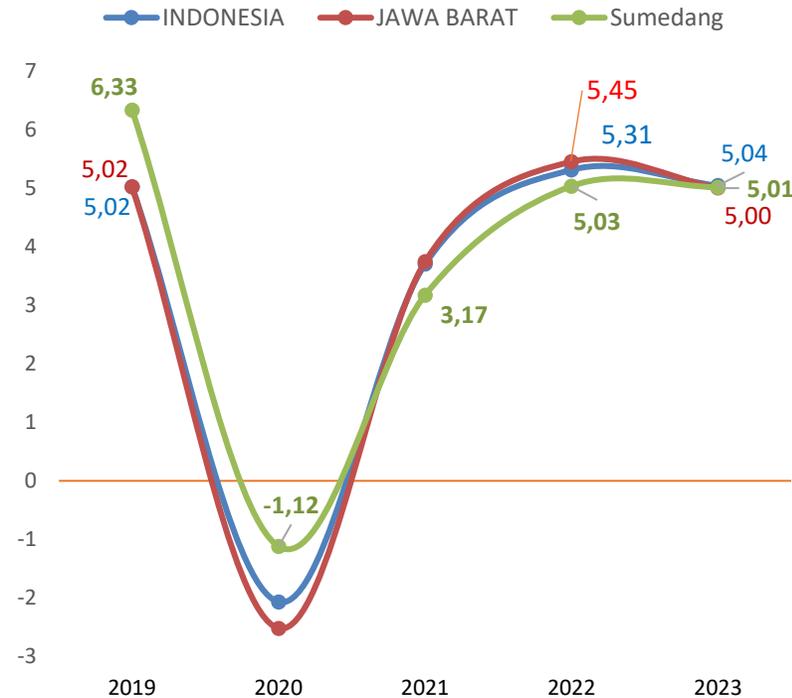
🏔️ Sebagian besar wilayah adalah **pegunungan** dengan ketinggian antara **25 mdpl – 1.667 mdpl**

Batas Wilayah :

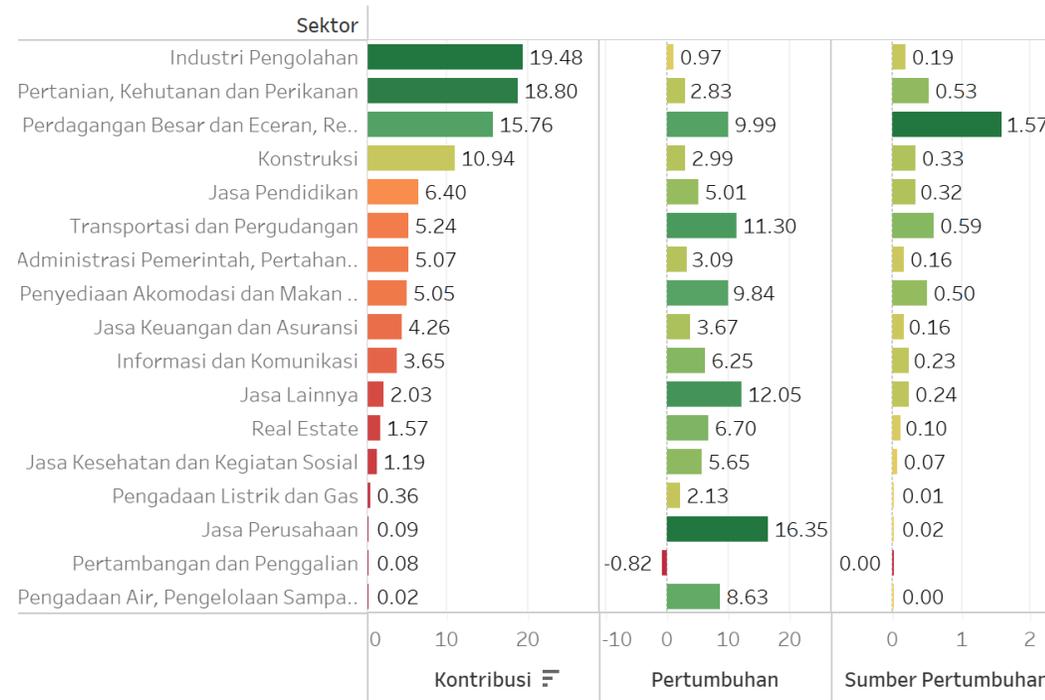
- Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu
- Sebelah Timur : Kabuapten Majalengka, Kabupaten Tasikmalaya
- Sebelah Barat : Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung
- Sebelah Selatan : Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung



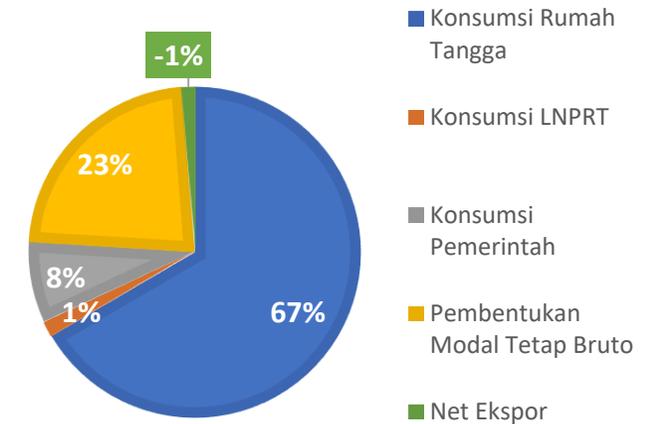
Pertumbuhan Ekonomi (%)



Kontribusi & Pertumbuhan Lapangan Usaha (%) pada PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2023



PROPORSI KOMPONEN PDRB 2023 BERDASARKAN PENGELUARAN (%)



- Struktur ekonomi Kabupaten Sumedang sejak 2019 masih didominasi 3 sektor utama (Industri, Pertanian, dan Perdagangan). Di tahun 2023 sektor perdagangan menjadi sumber pertumbuhan PDRB.
- Dari sisi pengeluaran, peran konsumsi rumah tangga sangat menentukan perekonomian Sumedang.
- Seiring berfungsinya tol Cisumdawu dan Bandara Kertajati, serta pengembangan Kawasan wisata Jatigede, Kawasan perkotaan Jatinangor, Sumedang Industrialpolis, Kabupaten Sumedang berpeluang mengakselerasi ekonomi wilayah melalui kegiatan industri, pariwisata, perdagangan, dan pertanian yang berkelanjutan dengan inovasi dan kolaborasi antar stakeholder.



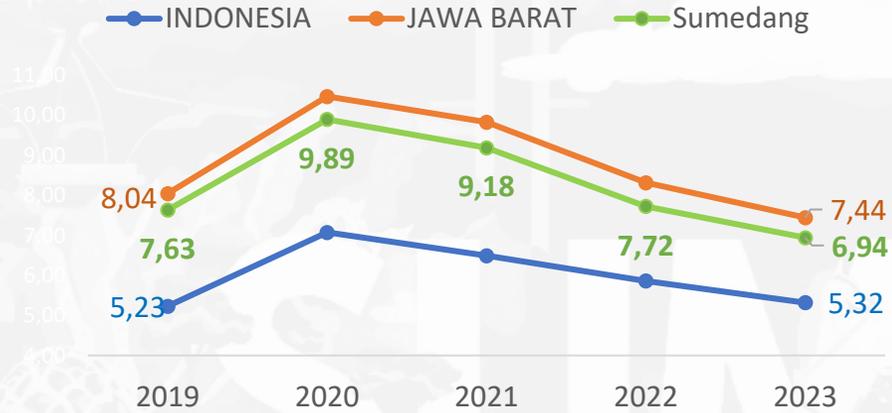
INSUN MEDAL

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

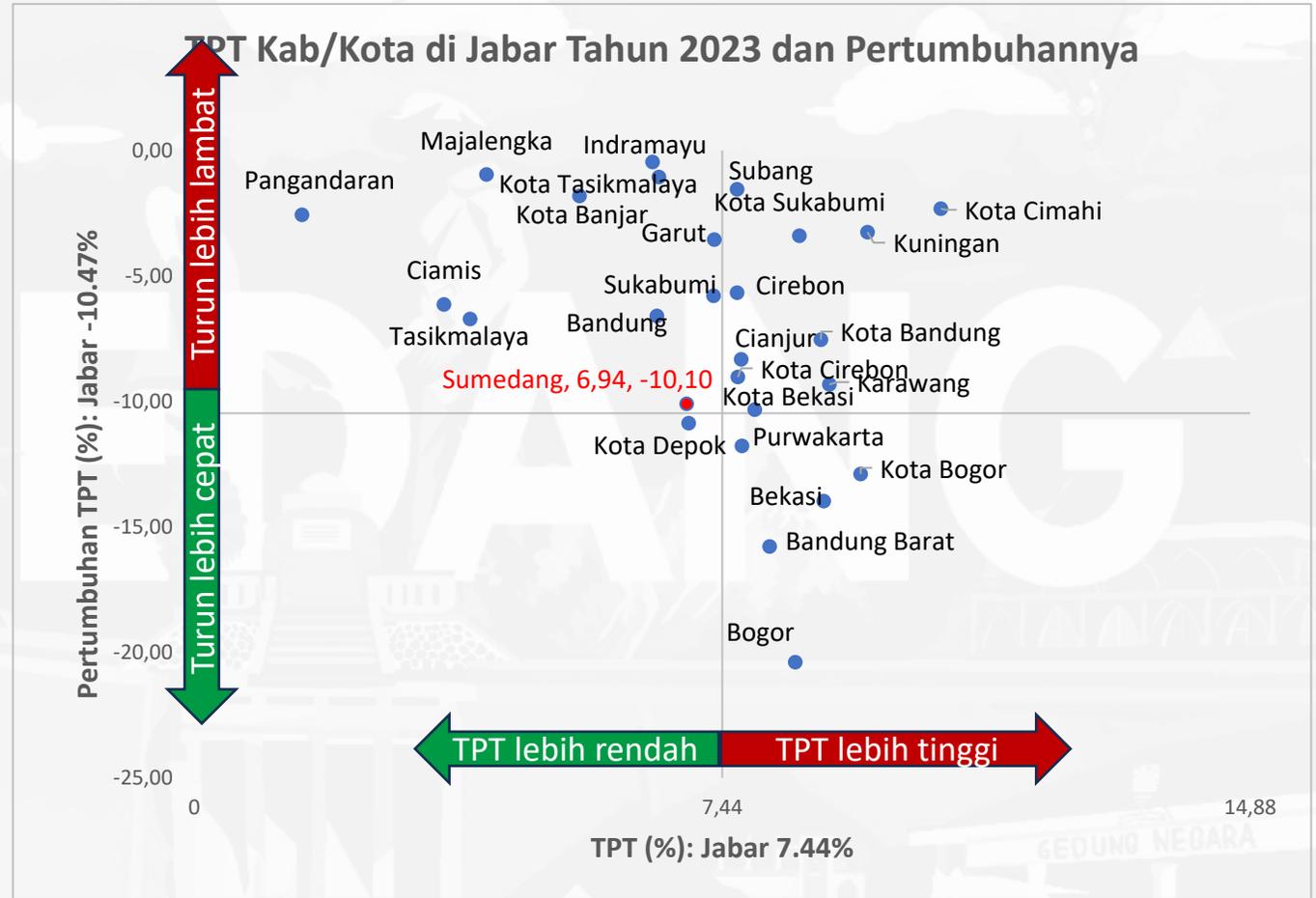
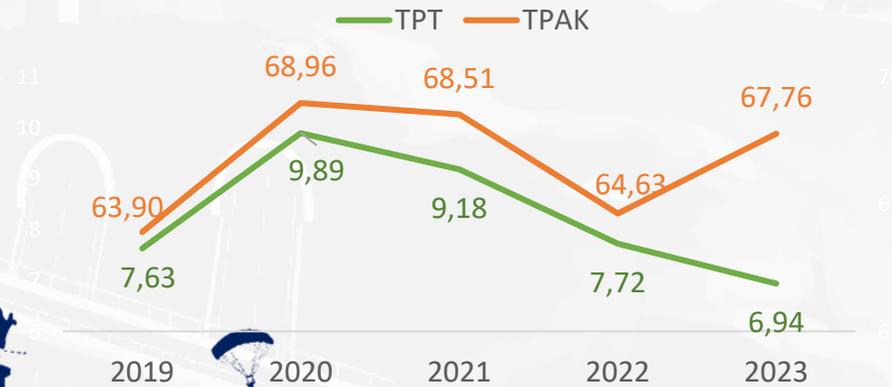


SUMEDANG
The City of Knowledge

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)



Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Sumedang



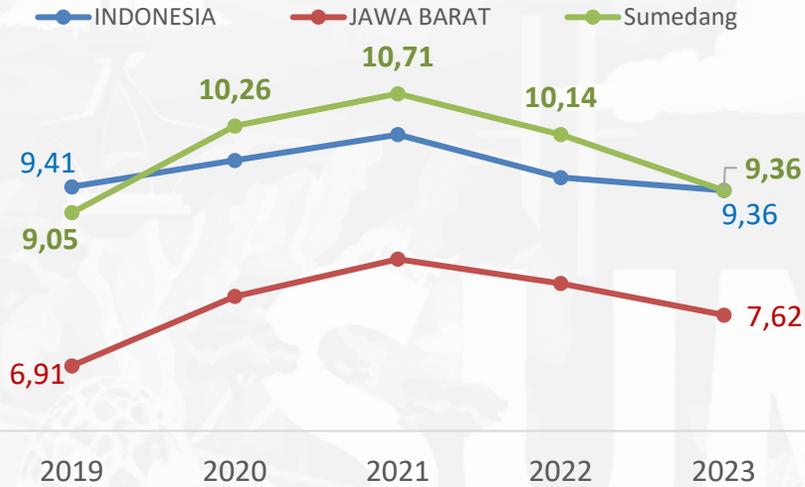
Tahun 2023, kondisi ketenagakerjaan lebih baik, ditandai dengan meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang disertai penurunan pengangguran, artinya sudah banyak Angkatan kerja yang kembali mendapatkan pekerjaan setelah sebelumnya terdampak pandemi Covid-19, bahkan TPT 2023 jauh lebih baik dibandingkan sebelum pandemi.



TINGKAT KEMISKINAN



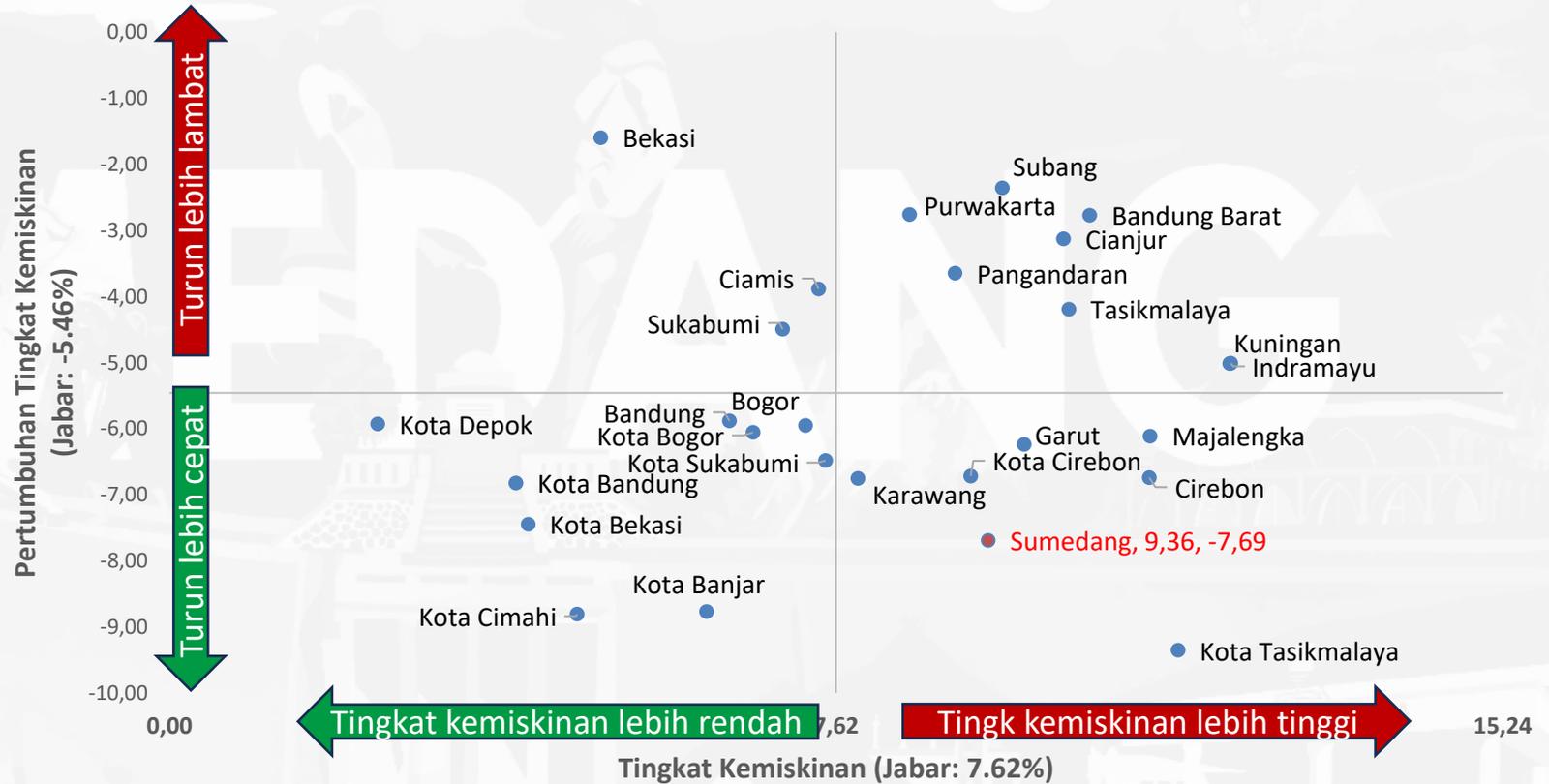
Tingkat Kemiskinan (%)



Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sumedang terhadap Jawa Barat



Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota dan Pertumbuhannya di Jawa Barat Tahun 2023



Capaian Tingkat kemiskinan Kabupaten Sumedang di tahun 2023 masih berada di atas rata-rata Jawa Barat, namun progress penurunannya lebih cepat dari Jawa Barat, dan jika dilihat dari gap penurunan (0,78 persen poin) berada di peringkat 3 terbaik di Jawa Barat. Share pada penduduk miskin Jabar juga semakin menurun.

DATA MISKIN EKSTREM DI KABUPATEN SUMEDANG

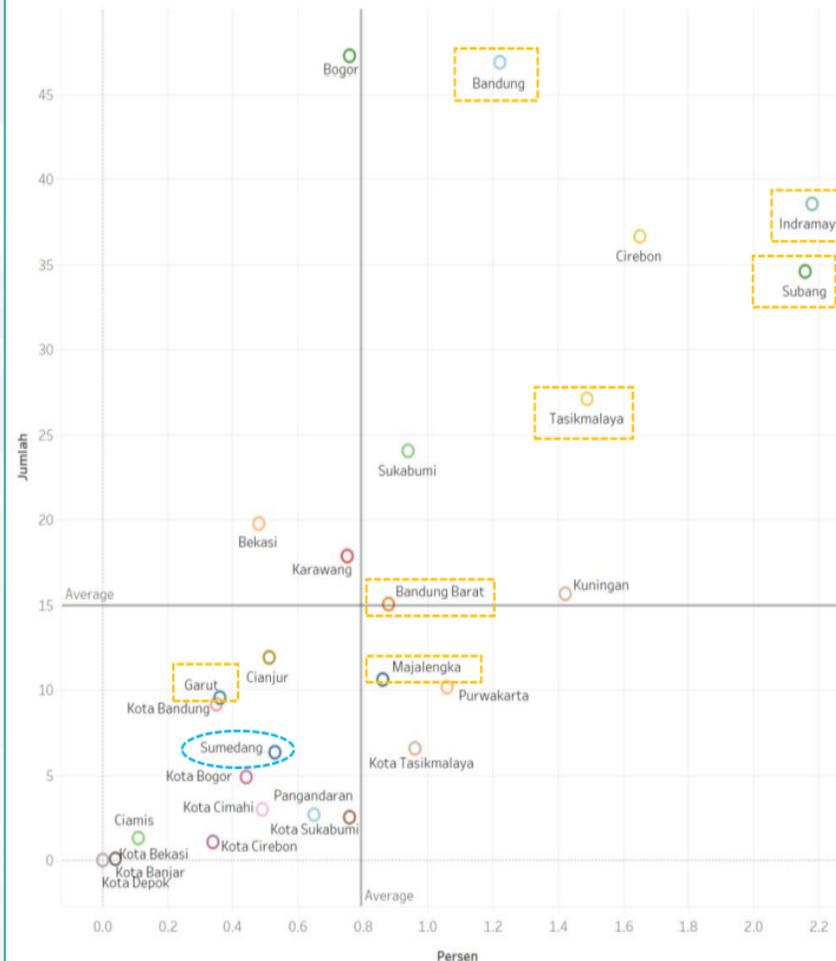
Berdasarkan surat **Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**, Nomor B-464/32/D-I/KPS.01.00/02/2024, Tentang **Estimasi Angka Kemiskinan Ekstrem Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2023**, diperoleh informasi sebagai berikut:

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Kab. Sumedang



- Jumlah penduduk miskin ekstrem 2023: **6.370 orang**, berkurang sebanyak **30.450 orang** dibandingkan 2022
- Persentase 2023: **0,53%**, menurun **2,58% poin** dari 2022

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Ekstrem di Prov. Jawa Barat



- Kabupaten Sumedang berada di **Kuadran Terbaik**, yaitu kab/kota dengan jumlah dan persentase penduduk miskin ekstrem di bawah rata-rata Jawa Barat. Rata-rata jumlah miskin ekstrem Jabar: **14.940 orang**, dan persentase miskin ekstrem Jabar : **0,79%**.
- Dibandingkan **kabupaten tetangga**, persentase miskin ekstrem Sumedang hanya sedikit lebih tinggi dari Garut, namun **jumlah penduduk miskin ekstrem di Sumedang menjadi yang paling rendah**.

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

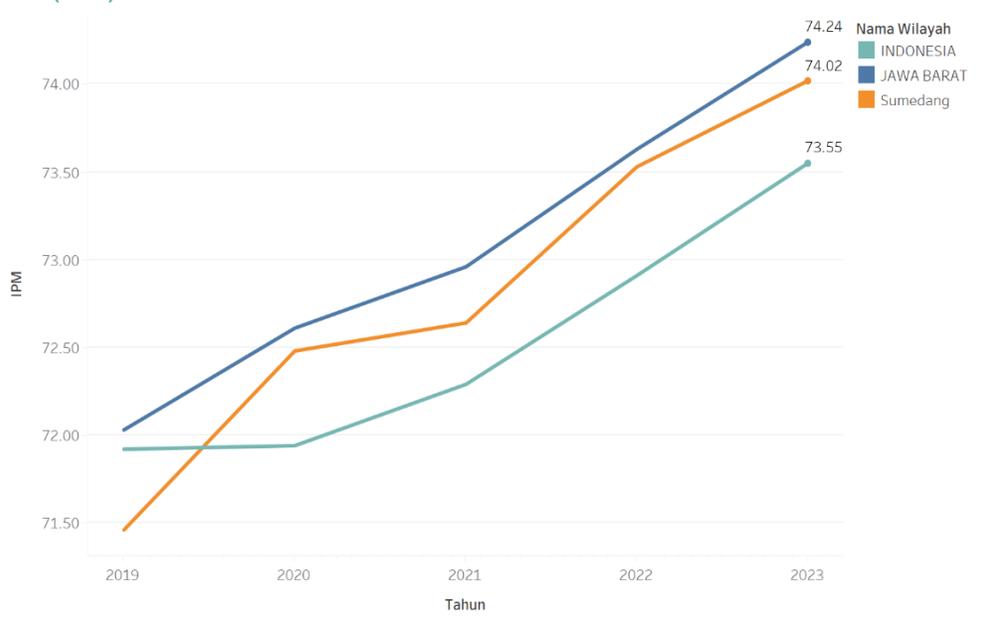


Sumedang

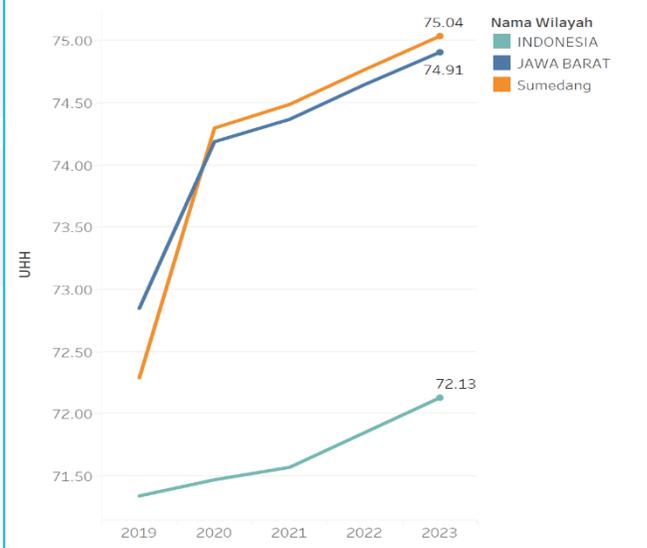


SUMEDANG
The City of Knowledge

IPM (Poin)



UHH (Tahun)

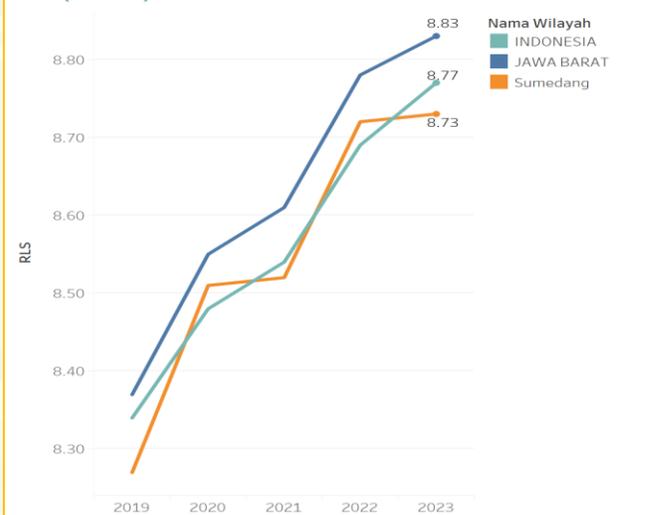


Pengeluaran per Kapita (Juta Rupiah)

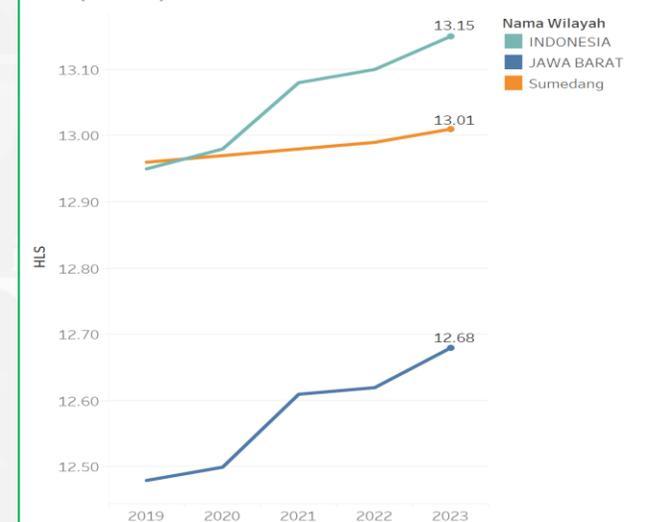


- Pencapaian IPM Kab. Sumedang (74,02) hasil update sensus penduduk 2020, berada di atas nasional namun masih di bawah Provinsi Jawa Barat.
- Usia Harapan Hidup Kabupaten Sumedang berdasarkan data sensus penduduk 2020 lebih baik dari Jabar dan nasional, sementara pengeluaran per kapita masih dibawah rata-rata Jabar dan Nasional.

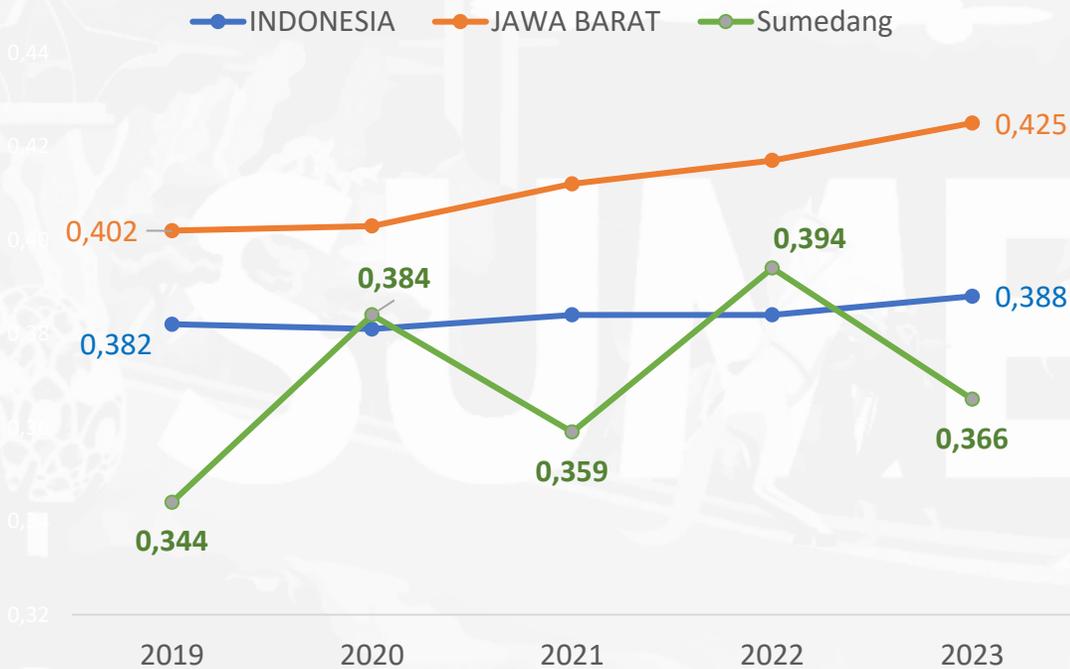
RLS (Tahun)



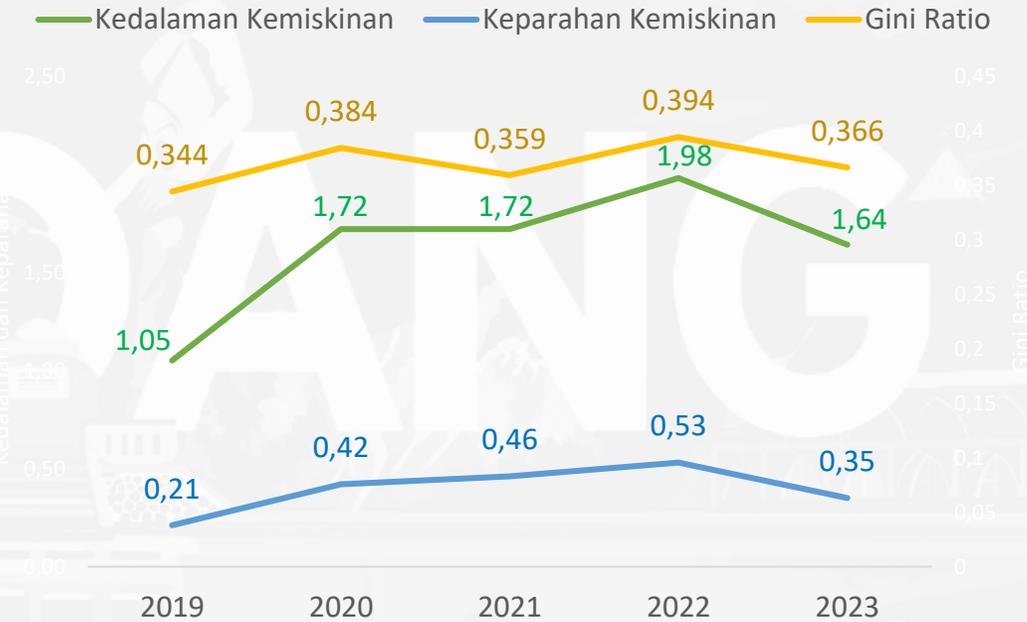
HLS (Tahun)



Gini Ratio Sumedang, Jabar, dan Nasional



Hubungan Gini Ratio dengan Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan



Ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Sumedang mengalami fluktuasi. Hal yang sama juga terlihat di level nasional namun tidak begitu signifikan. Pada saat Nasional dan Jawa Barat ketimpangan tahun 2023 dibanding tahun 2022 menunjukkan tren meningkat Kabupaten Sumedang justru menunjukkan penurunan. Pola tren data ketimpangan di Sumedang ternyata relatif sejalan dengan kedalaman dan keparahan kemiskinan.



CAPAIAN INDIKATOR MAKRO TAHUN 2023

INDIKATOR	SATUAN	2023		
		TARGET	REALISASI	KETERCAPAIAN
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	POIN	72,4 - 73,3	74,02	MELAMPAUI TARGET
TINGKAT KEMISKINAN	PERSEN	9,70 - 7,56	9,36	BERADA DALAM RANGE TARGET
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	PERSEN	8,18 - 6,95	6,94	MELAMPAUI TARGET
GINI RATIO	POIN	0,37 - 0,34	0,366	BERADA DALAM RANGE TARGET
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	PERSEN	5,20 - 6,20	5,01	BELUM MENCAPAI TARGET
PDRB PER KAPITA (ADHB)	JUTA RUPIAH	33,8 - 34,7	36,77	MELAMPAUI TARGET

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS



ISU PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING

1. Pelayanan kesehatan yang belum merata di setiap wilayah;
2. Prevelensi Stunting yang masih perlu diturunkan menuju zero stunting;
3. Belum meratanya pelayanan pendidikan yang memadai;
4. Pelayanan PPKS yang masih perlu ditingkatkan efektivitasnya;
5. Masih Adanya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat
6. Daya saing pemberdayaan perempuan yang masih belum optimal;
7. Masih terdapatnya *mismatch* dan *miseducation* antara kompetensi angkatan kerja dan kebutuhan pasar tenaga kerja, serta desakan transformasi ekonomi.
8. Belum Optimalnya Perlindungan, Pengembangan dan pemanfaatan Kebudayaan.
9. Masih rendahnya Literasi Digital Masyarakat



ISU PERTUMBUHAN EKONOMI

1. Nilai Tambah sektor Pertanian, Perikanan dan Peternakan yang masih rendah;
2. Ketahanan pangan yang rentan terhadap disrupsi ekonomi;
3. Lambatnya pertumbuhan nilai ekonomi UMKM;
4. Belum optimalnya Penguatan Destinasi, Promosi, Industri dan Kelembagaan pariwisata.
5. Belum optimalnya Pengembangan dan pembangunan kawasan industri;
6. Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam Pengembangan sektor perdagangan;
7. Belum optimalnya peningkatan nilai Investasi Daerah.



ISU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG MERATA DAN BERKELANJUTAN

1. Belum meratanya Pembangunan dan peningkatan infrastruktur konektivitas wilayah;
2. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang rentan terhadap bencana dan perubahan iklim;.
3. Belum merata dan terjangkau ketersediaan infrastruktur dasar (Air bersih dan Sanitasi layak)
4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang belum mempertimbangkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan;
5. Masih tingginya jumlah timbulan sampah yang belum dikelola dengan baik;
6. Belum Optimalnya Penataan Ruang
7. Masih rendahnya intensitas Pemeliharaan Infrastruktur (Jalan, jembatan, irigasi dll)



ISU REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

1. Belum Optimalnya dampak penerapan tata kelola Pemerintahan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SPBE) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
2. Belum optimalnya penguatan kualitas kebijakan dan penegakan regulasi daerah;
3. kinerja aparatur masih kurang efektif dan efisien
4. Distribusi dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia ASN belum merata
5. Belum optimalnya Penerapan hasil Penelitian dan pengembangan pembangunan daerah serta Ekosistem Inovasi di Kabupaten Sumedang
6. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi PAD dalam peningkatan Pendapatan Daerah
7. Masih rendahnya literasi digital aparatur

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH TAHUN 2025

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH TAHUN 2025

1

Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian, Perikanan dan Peternakan dalam mendukung terwujudnya kemandirian pangan

2

Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, mudah, dan cepat serta pelayanan publik yang efisien

3

Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang menunjang konektivitas wilayah dan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

4

Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas ketenagakerjaan

5

Mengembangkan ekonomi lokal pada sektor ekonomi kreatif, Perdagangan, industri dan UMKM

6

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif, inovatif, dan berdayasaing

ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025

1

Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah khususnya melalui intensifikasi pendapatan daerah melalui peningkatan sistem pemungutan dan sistem pengawasan serta melakukan penyesuaian kebijakan dengan perkembangan regulasi yang berlaku.

2

Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah khususnya ekstensifikasi pendapatan daerah Pemerintah Daerah meningkatkan akurasi perhitungan potensi Pendapatan Asli Daerah yang dapat dijadikan sumber-sumber pendapatan baru.

3

Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;

4

Dalam rangka digitalisasi Pemerintah Daerah melakukan pembenahan manajemen pemungutan, dengan menggunakan sistem informasi yang kredibel dan akuntabel, sehingga ketersediaan data obyek pajak dan retribusi terintegrasi secara menyeluruh dan transparan.

5

Mendayagunakan kekayaan atau asset-aset yang *idle*, dengan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

6

Peningkatan Pendapatan Transfer dengan melakukan koordinasi dan konsultasi yang intens antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

ARAH KEBIJAKAN BELANJA

1

- Belanja Wajib dan Mengikat
- Pemenuhan Target Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Pemenuhan Kebutuhan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
- Pemenuhan Belanja Mandatory Spending

3

Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lainnya

2

- Program Strategis Daerah
- Pendanaan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah
- Pemenuhan Secara Bertahap Prosentase Belanja Pegawai dan Belanja Infrastruktur Sesuai UU 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
- Meningkatkan Penerimaan Daerah pada Sektor Pendapatan Asli Daerah
- Sinkronisasi Data terkait Indikator- Indikator untuk Peningkatan Dana Transfer kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang

PROYEKSI KEUANGAN DAERAH

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2025	BERTAMBAH /BERKURANG
PENDAPATAN DAERAH	2.993.553.209.614,00	3.032.328.006.367,00	38.774.796.753,00
BELANJA DAERAH	3.039.553.209.614,00	3.570.098.141.585,66	530.544.931.971,66
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00	10.000.000.000	-40.000.000.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.000.000.000,00	15.400.000.000,00	11.400.000.000,00

ANGKA DIMAKSUD MASIH **BERSIFAT PROYEKSI** SEHINGGA AKAN ADA PENYESUAIAN – PENYESUAIAN PADA PROSES PENYUSUNAN RKPD, KHUSUSNYA PADA SEKTOR PENERIMAAN PEMERINTAH SERTA PADA PROSES PEMBAHASAN RKPD TAHUN 2025



Tema Pembangunan Tahun 2025 :

EKONOMI DAERAH YANG TANGGUH, INKLUSIF, DAN BERKELANJUTAN

Kabupaten Sumedang Tahun 2025 ingin mengakselerasi pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan Masyarakat. Pertumbuhan ekonomi ini harus bersifat **Tangguh** dalam arti perekonomian dapat bertahan dan memiliki daya bangkit yang cepat di Tengah tantangan disrupsi seperti bencana dan resesi global

Pertumbuhan ekonomi juga perlu bersifat **Inklusif** dimana kesejahteraan yang dicapai dapat dirasakan oleh seluruh lapisan Masyarakat serta dapat mengurangi ketimpangan. Dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, proses Pembangunan harus mempertimbangkan keselarasan dan **Keberlanjutan** pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025



SUMEDANG
The City of Knowledge



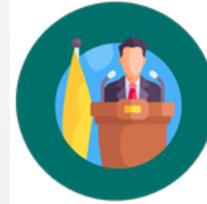
Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan ditunjang infrastruktur wilayah yang berkualitas

1. Pemerataan Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar, infrastruktur wilayah dan Konektivitas
2. Peningkatan intensitas pemeliharaan infrastruktur.
3. Penguatan Mitigasi dan Penanganan bencana serta adaptasi perubahan iklim;.
4. Penguatan Ketahanan pangan terhadap disrupsi ekonomi;
5. Peningkatan Nilai Tambah sektor Pertanian, Perikanan dan Peternakan
6. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mempertimbangkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan;
7. Peningkatan pengelolaan persampahan
8. Optimalisasi Penataan Ruang
9. Penguatan Destinasi, Promosi, Industri dan Kelembagaan pariwisata.
10. Peningkatan nilai ekonomi sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif;
11. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam Pengembangan sektor perdagangan;
12. Pengembangan dan pembangunan kawasan industri;
13. Peningkatan nilai Investasi Daerah.



Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Produktif dan Berdaya saing

1. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan
2. Pemerataan aksesibilitas dan kualitas Pelayanan kesehatan di setiap wilayah;
3. Penurunan AKI, AKB dan Prevalensi Stunting;
4. Penurunan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat
5. Peningkatan efektivitas Pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
6. Penguatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak serta ketahanan keluarga
7. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja sesuai pasar kerja dan transformasi ekonomi
8. Optimalisasi Perlindungan, Pengembangan dan pemanfaatan Kebudayaan.
9. Peningkatan peran serta pemuda dalam Pembangunan
10. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga publik
11. Peningkatan literasi digital masyarakat



Penguatan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif, Efisien dan Berdampak

1. Pemerataan Distribusi dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia ASN
2. Penguatan kualitas kebijakan dan penegakan regulasi daerah;
3. Peningkatan Kemandirian Desa
4. Penguatan penerapan tata kelola Pemerintahan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SPBE) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
5. Peningkatan kinerja aparatur yang efektif dan efisien
6. Penerapan hasil Penelitian dan pengembangan pembangunan daerah serta peningkatan Ekosistem Inovasi Daerah
7. Peningkatan Pendapatan Daerah
8. Peningkatan literasi digital aparatur



PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025

INPROSTAK 2025

Infrastruktur **Proy**ek **Str**ategis **K**abupaten Tahun **2025**

Penataan **Perkotaan Terpadu**

- Untuk Mendukung penataan Ibu Kota Kabupaten

Tuntas satu **Ruas Jalan KALECI**

- Rekonstruksi Ruas Jalan Cijeungjing – Lebaksiuh, sebesar Rp.9,1 milyar
- Rekonstruksi Ruas Jalan Lebaksiuh – Kadu, sebesar Rp.5,2 milyar

CAPAIAN INDIKATOR MAKRO TAHUN 2023 DAN PROYEKSI TAHUN 2024-2025

INDIKATOR	SATUAN	2023			2024	2025
		TARGET	REALISASI	KETERCAPAIAN	PROYEKSI	PROYEKSI
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	POIN	72,4 - 73,3	74,02	MELAMPAUI TARGET	73,11-73,99	73,74-74,59
TINGKAT KEMISKINAN	PERSEN	9,70 - 7,56	9,36	BERADA DALAM RANGE TARGET	9,50-7,26	9,43-7,40
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	PERSEN	8,18 - 6,95	6,94	MELAMPAUI TARGET	7,00-6,47	6,75-5,94
GINI RATIO	POIN	0,37 - 0,34	0,366	BERADA DALAM RANGE TARGET	0,36-0,33	0,35-0,32
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	PERSEN	5,20 - 6,20	5.01	BELUM MENCAPAI TARGET	5,30-6,50	5,50-6,82
PDRB PER KAPITA (ADHB)	JUTA RUPIAH	33,8 - 34,7	36.77	MELAMPAUI TARGET	36,20-38,32	38,18-40,24

INDIKASI PROGRAM DAN RENCANA PEMBIAYAAN TAHUN 2025

JUMLAH PROGRAM	RENCANA PEMBIAYAAN
	2025
143 Program Urusan	1.525.914.003.159,00
1 Program Penunjang	1.945.250.384.573,00



USULAN ASPIRASI MASYARAKAT

HASIL MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2024



SUMEDANG
The City of Knowledge

KEGIATAN	JUMLAH USULAN
Rekonstruksi dan Rehabilitasi Jalan	33
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	7
Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	43
Pengadaan Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN)	23
Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan	28
Pengadaan, Pemasangan dan Pemeliharaan PJU	63
Pelatihan Kewirausahaan (Digital marketing, packaging, dll)	13
Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	32
Penanganan dan Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan	2
Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa	1
Pengadaan Bibit Ternak	61
Peningkatan Kapasitas SDM BUMDes Bersama	15
Penataan Alun - Alun Kecamatan	1
Pembangunan Gapura Batas Wilayah Kecamatan	2

USULAN BANTUAN KEUANGAN KOMPETITIF JABAR TAHUN 2025

TEMA	FOCUS	SASARAN	KAMUS TEMA	USULAN KEGIATAN	USULAN ANGGARAN (RP)	PERANGKAT DAERAH TUJUAN
PERCEPATAN PENANGANAN KEMISKINAN DAN STUNTING	KEMISKINAN	PENGURANGAN WILAYAH KANTUNG KEMISKINAN DI KAWASAN KUMUH	BKK KOMPETITIF -PENANGANAN INFRASTRUKTUR DASAR DI WILAYAH KANTUNG KEMISKINAN	1 PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN TEMATIK (PEMANTIK)	19.061.000.000,-	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA BARAT
	Sosial	Perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak	BKK Kompetitif -Inovasi penanganan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak termasuk trafficking	2 Perlindungan Inklusif Lawan dan Cegah Kekerasan bagi Perempuan dan Anak Terintegrasi (Peri Langit)	24.650.000.000,-	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat
Peningkatan Aktivitas Ekonomi Untuk Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal	Ketahanan Pangan	Pengembangan sentra produksi pangan	BKK Kompetitif – Pengembangan sentra Tanaman Pangan dan Hortikultura	3 Sumedang Berkualitas, Integratif, dan Unggul (SAPERTOS KITU)	16.779.219.685,-	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Jawa Barat
	Ketahanan Pangan	Pengembangan sentra produksi pangan	KK Kompetitif - Optimalisasi peran dan fungsi Balai Penyuluh Pertanian (BPP)	4 Revitalisasi Peran UPTD/BPP Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui “Gadget Tani”	16.779.996.000,-	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Jawa Barat
Perubahan Iklim dan Kebencanaan	Kebencanaan	Sasaran/komunitas Tangguh bencana infrastruktur Tangguh bencana	BKK Kompetitif – Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas	5 Pengurangan Resiko Bencana Terpadu (PRABU)	16.523.250.000,-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persampahan	Pengelolaan sampah di sumber	BKK Kompetitif - Circular Ekonomi terkait pengolahan dan pemanfaatan Limbah Pertanian, Perikanan dan Peternakan (Maggot)	6 Pembuatan Tempat Pengolahan Sampah Organik/Rumah Magot di Desa Cikurubuk Kec. Buahdua	600.000.000,-	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
JUMLAH					94.393.465.685,-	



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



SUMEDANG
The City of Knowledge



TERIMA KASIH